

ISSN : 2598-5094



TIBANNDARU

Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017



**Media Informasi dan Komunikasi
Kepustakawanan**



TIBANNDARU

JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN SAIN INFORMASI FISIP UWKS

Pelindung

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penasehat

Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Dr. Bambang Suprijadi, M.Si.

Penanggung Jawab

Fahriyah, S.Sos., MA

Pemimpin Redaksi

Drs. Bakhtiyar, S.Sos., M.IP.

Redaksi Pelaksana

Dr. Bambang Suprijadi, M.Si. M.Si., Drs. Yudi Harianto Cipta U., M.IP.,
Drs. Ahmad Sufaidi, M.IP., Dra. Christine Lucia Mamuaya, M.IP., Drs. Bakhtiyar, S.Sos.,
M.IP., Fahriyah, S.Sos., MA., Yanuastrid, Shintawati, S.IPI., M.Si., Rr. Siti Dwijati, S.Sos.,
M.Si., Dra. Heddy Poerwandari, M.IP., Rudi Santoso, S.Sos., MM., Wahyu Kuncoro, S.IP.,
M.IP. Bambang Prakoso, S.Sos., M.IP., Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

Mitra Bestari

Imas Maesaroh, P.Hd.
(Pakar Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Ida Fajar Priyanto, P.Hd.
(Pakar Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Dra. Munawaroh, M.Si.
(Kepala Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya)
Endang Fitria Manan, S.IPI., M.A.
(Dosen Prodi Teknisi Ilmu Perpustakaan Universitas Airlangga)

Produksi

Munari, Hendro

Distribusi

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Perpustakaan

Terbit setiap : April dan Oktober

Alamat Sekretaris/Redaksi

Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Telp. (031) 5677577. Website: jipfisip.uwks.ac.id.
Email: JIPFisip.@uwks.ac.id.



TIBANNDARU

JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN SAIN INFORMASI FISIP UWKS

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	i
1. REOREANTASI SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS (STUDI KASUS DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA) <i>Iskandar</i>	1
2. ANALISIS <i>WEEDING</i> KOLEKSI BUKU TEKS PERPUSTAKAAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA <i>Anita Erna Faricha, Fahriyah</i>	9
3. SIKAP PEMUSTAKA TERHADAP LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING (STUDI KASUS PUSTAKA BERSAMA DI KECAMATAN BAYUNG LENCIR) <i>Ita Shylvia, Bambang Prakoso</i>	26
4. ANALISIS PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN INSTIPER) <i>Helmi Afroda</i>	41
5. ANALISIS STRES KERJA DOSEN BERTIPE PRIBADI A DAN B DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS 7 JAWA TIMUR <i>Redy Eko Hari Suprpto, Bambang Sukarson, Bambang Setyadarma</i>	55
6. KESIAPAN DAN PERSIAPAN PUSTAKAWAN, UNTUK BERJUANG MEREbut DAN MERENGKUH KEMBALI PELUANG YANG DIANGGAP TELAH HILANG <i>Bakhtiyar</i>	64

KESIAPAN DAN PERSIAPAN PUSTAKAWAN, UNTUK BERJUANG MEREbut DAN MERENGKUH KEMBALI PELUANG YANG DIANGGAP TELAH HILANG

Bakhtiyar

Email : bakhtiyar.fisipuwks@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi perpustakaan daerah sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa informasi, sangat dapat mendukung otonomi daerah dan dalam perkembangan serta pengembangan e-government sebagai nilai tambah positif bagi perpustakaan. Ruang lingkup kajian berfokus pada perwujudan kesiapan dan kesiapan pustakawan dalam e-government. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yang menggunakan data primer sebagai sumber informasi primer. Metode kajian dalam pencarian data adalah kajian perpustakaan atau studi pustaka (*library research*). Analisis kajian menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Adapun sumber analisa berasal dari kajian bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. Di samping itu, juga dilakukan analisis isi (*content analysis*). Observasi digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung konstruksi teoritis. Hasil kajian meliputi: (1) Adanya dampak implementasi UU Otonomi Daerah pasca reformasi terhadap pengembangan dan perkembangan perpustakaan umum dan daerah sebagai *E-Government*, (2) Kesiapan dan persiapan pustakawan dalam merebut dan merengkuh peluang yang masih terbuka lebar, untuk berperan aktif dalam *E-government*.

Kata Kunci: Undang-Undang, Otonomi Daerah, Perpustakaan Daerah, E-Government

PENDAHULUAN

E-government adalah merupakan sebuah model pengembangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dengan memanfaatkan secara intensif dan ekstensif berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi, untuk mencapai bentuk pemerintahan yang ideal. Adanya *e-government* tersebut diharapkan tercipta pemerintahan yang responsive terhadap keinginan masyarakat, transparan, dan akuntabilitasnya terjaga. Masyarakat diharapkan lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintah, serta dapat lebih meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Kehidupan konstelasi politik Negara dan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri telah mengalami berbagai perubahan secara cepat dan drastis sejak era reformasi. Saat ini telah terjadi pemberian otonomi daerah yang sangat luas, dengan desentralisasi tugas dan tanggung jawab besar, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Kebijakan untuk desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah diimplementasikan dalam sistem administrasi publik, baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Implementasi

kebijakan publik tersebut dalam kurun waktu 2001 - 2004 telah dievaluasi kembali dan kedua Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melihat substansi pemberlakuan undang-undang yang baru, nampak terjadi perubahan dalam skala besar dan improvisasi sehingga otomatis membawa perubahan-perubahan sendi tata pengelolaan kehidupan kenegaraan, pada tahapan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan secara terperinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di samping urusan wajib tersebut, di dalam ayat (2) Pasal yang sama dijelaskan pula mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Apabila dibandingkan dengan kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota menjadi lebih komprehensif bukan saja mencakup kewenangan penyelenggaraan pemerintahan pada sektor-sektor tertentu, namun lebih mengarah pada fungsi pelayanan publik dalam bidang-bidang kewenangan yang telah di desentralisasikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kabupaten/kota lebih mengarah pada dimensi regulasi, fasilitasi dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan jiwa konsep otonomi daerah itu sendiri yaitu demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diadopsi kembali asas umum penyelenggaraan negara yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Pencantuman kembali asas-asas umum penyelenggaraan negara di dalam Undang-Undang ini tidak lain ingin mereduksi konsep *good governance* dalam kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah Dharma Setyawan Salam (2004:107-1110).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi publik di daerah kabupaten/kota di Indonesia, benar-benar menerapkan prinsip *good governance* serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi yang diberlakukan sangat diharapkan mampu mendorong terjadinya layanan publik yang baik dan lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan publik yang dihasilkan, diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, guna menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan public yang menjadi kewajiban negara kepada warganya.

Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur melalui kualitas layanan publik yang semakin baik. Kebijakan desentralisasi yang hanya untuk menggantikan peran pemerintah pusat di daerah, tanpa melakukan perubahan pada transaksi sosial yang terjadi, maka sangat sulit

untuk diharapkan terjadinya efek positif dari kebijakan publik tersebut. Oleh karenanya perbaikan kualitas layanan publik menjadi faktor yang utama dan determinan dalam realitas implementasi kebijakan desentralisasi.

Pelayanan publik adalah merupakan bagian yang sangat krusial dalam suatu praktek Negara demokrasi, banyak ahli berpendapat bahwa pelayanan publik sebagai demokrasi dalam artian yang sebenarnya, karena demokrasi sebagai konsep, hanya dapat dirasakan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Tingkat heterogenitas dan penyebaran yang luas, maka sangatlah rentan bagi suatu pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan masyarakat, sesuai dengan tingkat kebutuhan apalagi tingkat kepuasan rakyat. Dalam konteks ini layanan publik menjadi tolok ukur penting, untuk dapat melihat dengan jelas perjalanan demokrasi dan desentralisasi.

Demokrasi dan desentralisasi harus dilihat dari kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan transaksi sosial yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu layanan publik. Marsh dan lan mengemukakan 2 (dua) perspektif yang penting diamati dalam layanan publik yaitu (Ibid.:111):

1. Dimensi *service delivery agent* (dinas atau unit kerja pemerintah)
2. Dimensi *customer* atau *user* (masyarakat yang memanfaatkan).

Berdasarkan dimensi pemberi layanan, yang perlu diperhatikan tingkat pencapaian kinerja yang meliputi layanan yang adil (dimensi ruang dan klas sosial), kesiapan kerja dan mekanisme kerja (*readiness*), harga terjangkau (*affordable price*), prosedur sederhana dan dapat dipastikan waktu

penyelesaiannya. Sementara itu dari dimensi penerima layanan publik harus memiliki pemahaman dan reaktif terhadap penyimpangan atau layanan tak berkualitas yang muncul dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Keterlibatan aktif masyarakat baik dalam mengawasi dan menyampaikan keluhan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik menjadi faktor penting umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan publik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk dapat menentukan sendiri focus dan arah pembangunan daerah. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara lebih memanfaatkan semaksimal mungkin berbagai sumber daya yang dimiliki dan kemampuan para perangkat daerah.

Salah satu perangkat daerah yang sangat terkait dengan penyebaran informasi adalah perpustakaan daerah, sebagai badan yang selama ini hanya dipandang dan dianggap sebagai sumber bacaan umum, terutama yang bersifat hiburan serta kurang mendapat apresiasi. Dalam konsep pengembangan dan pembangunan daerah, maka perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, apabila dapat lebih diintensifkan fungsinya.

Sebagai salah satu pusat atau sumber informasi pembangunan daerah, peran sangat perpustakaan sangat dibutuhkan dan menjadi penting. Dalam segala aktivitas kerjanya, perpustakaan telah mengaplikasikan dan memanfaatkan berbagai sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sangat memungkinkan transfer

informasi yang lebih cepat, murah, tepat, dapat dan efektif. Adapun Fungsi penyebaran informasi, kemudian dapat dikembangkan dan diintensifkan dengan pemberian layanan dalam model informasi yang beragam, sehingga sangat dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi perpustakaan.

Bidang layanan publik yang sangat krusial adalah masalah layanan jasa informasi. Dalam layanan jasa informasi merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat, yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui prosedur tertentu. Masalah layanan jasa informasi menyangkut dua sisi kepentingan yaitu;

1. Kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah,
2. Kepentingan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian dalam melakukan usaha dan kegiatan berkaitan dengan informasi yang mempunyai efek di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Keseluruhan permasalahan yang muncul dalam pelayanan layanan jasa informasi menjadi semakin krusial, ketika prosedur pemberian layanan tersebut tidak dibakukan secara komprehensif dan tidak ditetapkan dalam suatu standar pelayanan yang baik. Pelayanan jasa informasi akan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, apabila dalam pelaksanaannya tidak terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri dalam sektornya masing-masing. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke depan, salah satunya adalah bagaimana dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara, sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip utama kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, akuntabilitas publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman yang bersifat integral dan holistik terhadap eksistensi atau keberadaan perpustakaan daerah, sebagai salah satu perangkat daerah, yang bergerak di bidang layanan jasa informasi, dapat mendukung otonomi daerah dan perkembangan *e-government*, sehingga akan dapat meningkatkan nilai tambah perpustakaan sebagai salah satu aktor dalam *e-government*. Selanjutnya perpustakaan daerah tidak akan hanya dipandang sebagai suatu institusi yang hanya sekadar ada, akan tetapi eksistensi perpustakaan menjadi satu keharusan untuk kemajuan pembangunan daerah, dengan berlandaskan pada otonomi daerah dan memiliki visi dan misi maju dengan *e-government*.

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam pokok bahasan tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang; (1) Dampak implementasi UU Otonomi Daerah terhadap pengembangan dan perkembangan perpustakaan umum dan daerah sebagai *E-Government*. (2) Kesiapan dan persiapan pustakawan dalam merebut dan merengkuh peluang yang masih terbuka lebar, untuk berperan aktif dalam *E-government*. Kajian terhadap topik ini sangat menarik perhatian dan pembahasan karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau kaca mata ke ilmunan, yang tentunya memiliki berbagai perbedaan. Oleh karenanya penulis membatasi dengan menggunakan sudut pandang dalam kaca mata perspektif sosio politik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Aplikasi Perkembangan dan Peledakan Informasi Dalam Tata Kerja Pemerintahan.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sangat cepat, terutama dengan keberadaan internet yang telah diintrodusir dan diadopsi pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Adanya introdusir dan adopsi berbagai inovasi berupa teknologi informasi dan komunikasi (ICT), maka membawa perubahan-perubahan sosial pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tak dapat dielakkan dan dibendung lagi. Perubahan-perubahan sosial dan politik sebagai akibat dari aplikasi ICT, mengakibatkan suatu pemerintahan harus mampu beradaptasi dan dapat memanfaatkan dengan baik terhadap aplikasi ICT dalam dunia tata kerja.

Sebagaimana pendapat Tilaar dalam Asmani (2011:23) bahwa dewasa ini dunia menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam ranah kebudayaan. Peradaban dunia saat ini telah dikuasai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua sebab yang menjadi pertimbangan berkaitan dengan peranan teknologi dalam kehidupan manusia modern dewasa ini yaitu : (1). Tekonologi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kehidupan menjadi lebih mudah, relatif lebih baik, serta meningkatkan pola kehidupan manusia dari masyarakat tradisional menjadi modern. (2). Teknologi telah mengubah tata cara kehidupan dan merasuk di hampir semua unsur kebudayaan dan sendi kehidupan manusia. Teknologi sudah dianggap sebagai suatu yang wajar

dan tidak lagi dipersoalkan. Kemajuan teknologi begitu pesat, terbukti dapat memudahkan kehidupan manusia.

Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (*electronic government, e-government*). Hampir seluruh negara di dunia ini sudah mulai mencoba mengadaptasi, mengintrodusir, mengadopsi perkembangan internet dengan mengimplementasikan sistem informasi, yang sangat diyakininya merupakan bentuk dari *e-government*. *E-Government* diyakini merupakan perbatasan berikutnya (*next frontier*) yang harus dijelajahi dan dijajaki dalam menggunakan internet, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara prima, serta memiliki potensi terbesar untuk merevolusi penyelenggaraan pemerintahan dan merevitalisasi demokrasi. (*The Council for Exelence in Government, 2000*).

2. Urgensitas *E-Government* bagi Pemerintahan di Indonesia

Berbagai definisi *e-government* telah dikemukakan oleh berbagai lembaga dan institusi pemerintahan. Salah satunya, pendapat yang berwujud pernyataan cukup baik untuk mendefinisikan *e-government* dikeluarkan oleh World Bank (2001):

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the (1) ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of

government. These technologies can serve a variety of different ends, (2) better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, (3) citizen empowerment through access to information, or more, (4) efficient government management. The Resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.

Masih terdapat beberapa definisi lainnya, dengan menggunakan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda dinyatakan di dalam Tambourin (et.al) (2001:367-376), mulai dari "*e-business of the state*", pelayanan kepada penduduk dan rekayasa ulang (*re-engineering*) dengan memanfaatkan ICT, atau usaha pemenuhan kebutuhan publik dengan memanfaatkan Internet. Sementara itu sangat terkait dengan bidang administrasi public. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *e-government* sebagai : memanfaatkan internet dan world-wide-web untuk mengirimkan informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat.(UN-DPEPA,2002) Sangat terlihat dengan jelas sekali, bahwa interpretasi tentang *e-government* menjadi semakin meluas dan menyebar. (Krenner J. Wimmer M.,2001:329-337).

E-government dapat dipandang sebagai suatu visi dan misi disiplin sebagai pengarah untuk seluruh sektor administrasi dan pemerintahan. Dalam pembahasannya ternyata: wilayah keberadaan *e-government* dapat dipandang dan dibahas dalam skala besar dan dalam skala kecil. Dalam skala besar *E-Government* adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan administrasi termasuk *e-democracy, e-voting, e-*

administration, e-assistance, e-justice, bahkan e-healthcare atau e-education. Sedangkan pada skala kecil, *e-government* adalah implementasi proses administrasi lokal dalam domain *e-administration*.

Harapan yang muncul dari revolusi digital adalah memanfaatkan secara maksimal potensinya, untuk menguatkan demokrasi dan membuat pemerintah lebih responsive terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga layanan publik. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan akuntabilitasnya terjaga. (Center for Democracy and Technology: 2005).

Pengembangan *e-government* dimaksudkan sebagai salah satu metode untuk dapat memaksimalkan efisiensi bisnis pemerintahan, serta dapat mengefektifkan bagian yang berhubungan dengan saluran layanan (*services*) kepada publik, penyebaran informasi (*information dissemination*) sangat cepat dan merata, dapat mengurangi biaya cetak (*publishing*) dengan membuat versi elektronik dari dokumen-dokumen yang tersedia, sehingga sangat memungkinkan dapat melakukan penghematan biaya. Adapun salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan membangun portal atau situs pemerintahan di Internet.

3. Birokrasi Sebagai Suatu Komponen Penting Dalam Sistem Dari Organisasi Pemerintahan.

Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri khusus yang dikemukakan oleh Max Weber, telah menjadi pusat perhatian para ahli pikir

ilmuwan sosial. Sebagaimana dalam karyanya *The Theory of Economic and Social Organization*, Weber mengemukakan konsep tentang *the ideal type of bureaucracy*. Secara tegas pula Weber merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi, yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Pendapat Weber dirangkum oleh Donald P. Warwick dalam empat ciri utama yaitu:

(1) adanya suatu struktur hirarkhis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah. (*a hierarchical structure involving delegations of authority from the top to the bottom of an organization*); (2) adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas (*a series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilities*); (3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya (*formal rules, regulations and standards governing operations of the organization and behavior of its members*); (4) adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan (*technically qualified personal employed on a career basis, with promotion based on qualifications and performance*).

(Martin Albrow (1970), dalam Donald P. Warwick, *A Theory of Public Bureaucracy*, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press. 1975 hal.4 yang telah dikutip oleh Syukur Abdullah dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, 1991:225-226)

Di pihak lain seorang ahli bernama La Palombara, juga mengemukakan tentang ciri-ciri khusus dari organisasi birokrasi ke dalam lima aspek yaitu sebagai berikut ; (Ibid. 226)

- (1) aturan-aturan administratif yang sangat terdiferensiasi dan terspesialisasi (*specialized highly differentiated administrative rules*);
- (2) rekrutmen atas dasar prestasi (diukur melalui ujian) bukan atas dasar askripsi (*recruitment on the basis of achievement [measured by examinations] rather than ascription*);
- (3) penempatan, mutasi dan peralihan serta promosi atas dasar kriteria universalistis bukan atas dasar kriteria (*partikularistic criteria*);
- (4) administrator-administrator yang merupakan tenaga profesional yang digaji dan yang memandang pekerjaannya sebagai karir (*administrators who are salaried professionals who view their work as career*);
- (5) pembuatan keputusan administratif dalam konteks hirarkhi, tanggung jawab serta disiplin yang rasional dan mudah dipahami (*administrative decision making within a rational and readily understood context of hierarchy, responsibility and discipline*).

Masih banyak kritik dan kelemahan dari organisasi birokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, namun demikian kelebihan organisasi birokrasi dengan ciri-cirinya yang digambarkan oleh Max Weber, masih lebih baik apabila dibandingkan dengan organisasi lainnya dalam masyarakat. dan kelebihan-kelebihannya adalah sebagai berikut : (Ibid.227-228)

“ Ketepatan, kecepatan, kejelasan dan pengetahuan tentang kearsipan, kontinuitas, penyimpangan, kesatuan, subordinasi yang ketat, pengurangan friksi dan biaya material serta personal – semuanya merupakan prinsip-prinsip optimum yang menjadi pegangan administrasi birokrasi.... dibandingkan dengan semua bentuk administrasi organisasi kehormatan dan organisasi sukarela, ... birokrasi yang terlatih mempunyai kelebihan berkat prinsip-prinsip tersebut”.

Dalam realitas sangat perlu untuk disadari bahwa keberadaan birokrasi yang semakin besar, urusan yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan tugas dan wewenang yang tidak terkontrol menyebabkan birokrasi dapat menjadi “mesin” yang amat ditakuti masyarakat. Kondisi semacam itu kemudian menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan tingkat partisipasinya dalam pembangunan menurun dan sangat tidak maksimal..

Dalam suatu Negara yang memiliki kekuatan politik dan organisasi massa, kurang mampu untuk menjalankan fungsi-fungsinya, apabila tidak ditunjang oleh proses pengambilan keputusan dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, maka kekuasaan birokrasi akan semakin besar dan menjadi sangat dominan. Semakin besar kekuasaan birokrasi, maka aparat birokrasi sangat dimungkinkan, dapat dengan sangat leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sesuai dengan persepsi yang dimiliki serta semakin mengokohkan kedudukannya dalam tatanan dan aktivitas organisasi pemerintahan. Secara teoritis, kondisi semacam ini mencerminkan suatu kegagalan untuk dapat mewujudkan ide

demokrasi serta menutup keterbukaan kepada masyarakat.

Berdasarkan perbedaan dalam menjalankan tugas pokok dan misi yang mendasari organisasinya, maka birokrasi dapat dibedakan dalam tiga kategori (Ibdiid, 229-230) yaitu sebagai berikut;

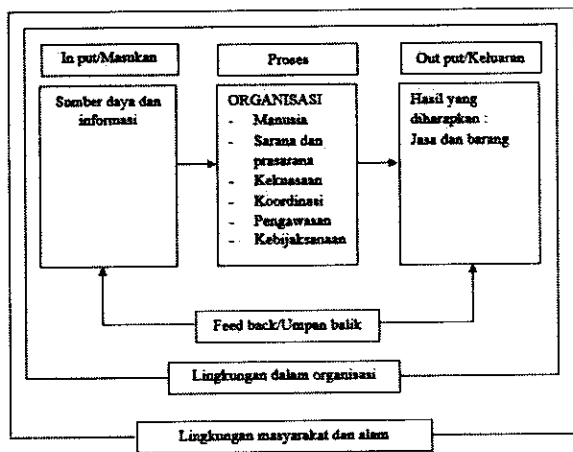
1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat "mengatur" (regulative Function)
2. Birokrasi pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*).
3. Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya merupakan bagian atau langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam kategori ini dapat disebutkan antara lain; rumah sakit, sekolah (mulai dari SD sampai SLTA), kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. Fungsi utamanya ialah "pelayanan (service) langsung kepada masyarakat". Termasuk dalam konsep ini ialah apa yang

disebut oleh Michael Lipsky sebagai birokrasi di lapangan (*street level bureaucracy*). Yaitu birokrasi yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan warga masyarakat.

Suradinata (1994) menyatakan bahwa pemahaman tentang birokrasi sebagai organisasi, mempunyai implikasi yang lebih luas daripada cakupan birokrasi secara normal. Organisasi dipandang sebagai suatu system dimana masukannya (*in put*) berupa sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber lainnya. Informasi dapat dijadikan dasar untuk rencana kegiatan atau tujuan. Dalam proses organisasi dipastikan selalu melibatkan aspek manusia, sarana dan prasarana, koordinasi, pengawasan, kekuasaan dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut merupakan sub-sistem, yang dapat dibagi lagi menjadi sub-sub sistem yang keseluruhannya merupakan sistem organisasi.

Proses organisasi merupakan sistem deterministik yang memiliki sub-system, dimana antara sub sistem satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, berinterrelasi dan terdependensi. Suatu perilaku yang dapat diramalkan, sehingga dapat ditransformasi pada keluaran (*out put*) sebagai hasil yang diharapkan berupa benda atau jasa. Dalam system ini, *out put* dikembalikan sebagai *in put*. Umpan balik guna mendapatkan proses yang lebih baik. Permodelan system sebuah organisasi diperlihatkan pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1: Permodelan proses sebuah sistem untuk suatu organisasi. (Ibid.)



4. Perkembangan Masyarakat informasi dan Partisipasi Masyarakat Menuju Terwujudnya E-government

Dalam suatu proses organisasi, selalu terdapat faktor-faktor pengaruh, dimana faktor pengaruh lingkungan yang harus diperhitungkan dengan seksama dan serius. Pengaruh lingkungan seringkali berhubungan dengan pembagian pekerjaan atau job diskripsi dalam proses organisasi. Disamping pengaruh lingkungan, dalam organisasi terdapat juga faktor-faktor pengaruh yang lainnya yaitu lingkungan masyarakat dan alam. Di dalam sistem administrasi/ birokrasi negara sangat jelas bahwa masukan (in put) dalam sistem politik untuk proses politik adalah:

1. (informasi) kebutuhan masyarakat dan negara
2. Sumber daya manusia dan alam.
3. Peran serta masyarakat.

Sementara hasil dari proses atau keluaran (out put) adalah pengambilan

keputusan dan kebijaksanaan pembangunan. Disinilah kata kunci informasi dan peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam mengembangkan administrasi/birokrasi negara yang efektif dan efisien dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik (lihat Osborne, 1996).

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat informasi, Siagian (2003) menyatakan pentingnya peranan informasi dalam kehidupan modern dewasa ini, sehingga masyarakat yang mengolah informasi secara "tradisional" dalam arti tidak menggunakan sarana bermuatan teknologi tinggi disebut masyarakat prainformasional untuk kata lain masyarakat yang belum maju. Sebaliknya masyarakat yang mengolah berbagai komponen penanganan informasi dengan memanfaatkan kemajuan ICT disebut sebagai masyarakat informasional. Dapat dikatakan pula bahwa untuk pemerintahan informasional adalah pemerintahan yang mengolah penanganan informasi dengan menggunakan ICT.

Ada beberapa ciri masyarakat informasional yang cukup penting adalah jumlah informasi yang melimpah, transmisi informasi yang cepat, lingkup informasi yang luas, biaya pengadaan informasi murah, mobilitas informasi, jangkauan informasi terbuka, cara penyampaian informasi lewat banyak media, unit penanganan informasi terutama menggunakan mesin, dan akses informasi yang luas. Sebagaimana menurut pendapat Webster (2006:8) yang berpendapat bahwa definisi masyarakat Informasi dikategorikan berdasarkan kriteria masing-masing yaitu: segi ekonomi, teknologi, pekerjaan, spasial dan budaya. Konsep masyarakat informasi selalu ditandai

dengan adanya tingkat kebutuhan informasi yang tinggi. Tiga karakteristik utama masyarakat informasi adalah kebutuhan informasi yang tinggi, penggunaan teknologi informasi dalam segala aktivitas kehidupan dan kemampuan dalam pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Sedangkan ciri sangat dominan pada masyarakat informasi adalah pesatnya perkembangan ICT yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan akses serta memanfaatkan informasi yang dibutuhkannya.

Konsep *e-government* yang dijadikan sebagai acuan, maka harus melihat dulu bagaimana proses pengolahan informasi sangat berpengaruh dalam kinerja pemerintahan, serta mengubah proses layanan kepada masyarakat. Apabila proses informasional yang terjadi hanya bersifat otomatisasi proses-proses di dalam pemerintahan, tetapi tidak memberikan transparansi pada proses administrasi Negara dan tidak membuat masyarakat berperan lebih terlibat dalam proses pemerintahan, maka *e-government* tidak terlaksana. Begitu juga sebaliknya, apabila *e-government* merupakan suatu proses antara, maka proses ini harus didahului oleh sebuah proses pemerintahan informasional, karena syarat utama terciptanya *e-government* adalah sangat sarat dengan penggunaan ICT. maka proses informasional mutlak harus ada dan terjadi lebih dulu.

METODE KAJIAN

1. Obyek Kajian.

Obyek kajian berintikan pada pembahasan dengan melakukan kajian mendalam tentang *content* kesiapan dan

persiapan yang terdapat pada tiap diri pustakawan untuk berperan dalam *e-government*. Penguasaan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi informasi komunikasi sangat penting bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesuksesan merebut *e-government* dalam dunia kerja dengan sangat syarat dengan kesuksesan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi.

2. Ruang Lingkup Dan Fokus Kajian.

Ruang lingkup kajian berfokus pada perwujudan kesiapan dan kesiapan pustakawan dalam *e-government*. Dalam dunia kerja pustakawan selalu menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, guna memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. Kepuasan pemustaka akan menghasilkan loyalitas pengguna yang tinggi sehingga informasi yang disajikan perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemustaka. Dalam kerja pustakawan selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan pimpinan, pemustaka, sesama pustakawan dan masyarakat, sehingga ketrampilan berkomunikasi dan berbahasa dapat membantu pustakawan untuk meraih kembali terhadap peluang yang dianggap telah hilang.

3. Pendekatan Dan Metode Kajian

Analisis-pemikiran kritis dan realitis terhadap pengaplikasian pemikiran suatu konsep dalam suatu kurun waktu yang telah dan sedang terjadi, secara metodologis kajian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Kajian sejarah memiliki ciri yang dominan yaitu merupakan penyelidikan kritis mengenai perkembangan pemikiran baik dijamin

lampau maupun sekarang dengan menggunakan data primer yang dianggap sebagai sumber informasi primer. Metode kajian yang digunakan dalam pencarian data yang berisikan informasi penting adalah kajian perpustakaan atau studi pustaka (*library research*) dengan membaca berbagai literatur yang bersubjekkan kesiapan dan persiapan pustakawan dalam e-government, serta perkembangan implementasinya dalam merengkuh dan merebut kembali peluang emas yang dianggap telah hilang yaitu untuk perpustakaan sebagai e-government.

4. Konseptualisasi Dan Analisis Kajian

Perwujudan kesiapan dan kesiapan pustakawan dalam e-government, sesungguhnya adalah menyeimbangkan dari gabungan kesiapan dan persiapan para pustakawan dan perpustakaan daerah dalam untuk berperan aktif sebagai aktor penggerak *E-Government*, yang terejawantahkan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam dunia pemerintahan. Menselaraskan antara keinginan, kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta profesionalisme pustakawan dalam *E-Government*, secara realitasnya tidaklah segampang membalikan telapak tangan, melainkan ditempuh melalui proses yang sangat panjang dan penuh dengan tantangan, rintangan dan hambatan. Namun demikian apabila pustakawan teguh, ulet dalam perjuangannya, maka pada akhirnya diperoleh wujud nyata yaitu kepercayaan masyarakat dan pemerintah bahwa perpustakaan dapat dan mampu sebagai *E-Government*.

Analisis kajian terhadap kesiapan dan persiapan pustakawan

dalam mewujudkan perpustakaan sebagai *E-Government*, dilakukan dengan menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Adapun sumber analisa berasal dari kajian bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. Di samping itu, juga dilakukan analisis isi (*content analysis*). Analisa isi dimaksudkan untuk melakukan analisa terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan konsep kesiapan dan persiapan pustakawan dalam merebut kembali peluang emas yaitu untuk dapat mewujudkan perpustakaan sebagai *E-Government*, serta aplikasinya tata kerja di pemerintahan. Observasi atau pengamatan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung konstruksi teoritis, khususnya mengenai makna kesiapan dan persiapan pustakawan, perkembangan dan peledakan teknologi informasi komunikasi dan makna dari perkembangan dan pengembangan *E-Government*.

PEMBAHASAN

1. **Pengembangan Otonomi Daerah,**
Perkembangan pemerintah daerah yang lebih luas dan otonom, dimulai sejak era reformasi pada tahun 1998 (saat yang hampir sama dengan merebaknya penggunaan Internet di Indonesia) dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32/2004, menyebabkan terjadinya perubahan dalam skala yang besar dan sangat cepat, terutama perubahan pada kekuasaan dan kewenangan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Pusat serta kekuasaan dan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (propinsi/kabupaten/kota). Secara esensi terjadi perpindahan kekuasaan dan

kewenangan yang sangat besar dan mengakibatkan implikasi yang luas dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Pusat telah memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, terlihat telah mencoba untuk membangkitkan kembali secara jelas, tentang semangat otonomi daerah dengan melaksanakan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Implementasi konsep dan rencana-rencana yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga kenegaraan di tingkat pusat, tidak serta merta diterima dan dilaksanakan begitu saja, apalagi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dengan mudah diabaikan oleh pemerintah di daerah, apabila dianggap tidak sejalan dengan visi pembangunan di daerah atau bila dianggap tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi daerah. Contoh paling jelas adalah keberadaan tentang berbagai retribusi daerah yang begitu kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena pola pikir keberhasilan pembangunan yang dinilai dari banyaknya dana yang dihasilkan, sehingga sering melupakan pemahaman proses investasi yang bersifat jangka panjang termasuk dalam investasi sumberdaya manusia daerah.

Pada Sistem dan organisasi otonomi daerah, memang menempatkan bupati/walikota sebagai pimpinan tertinggi daerah. Bupati/walikota dibantu oleh para staf, seperti kepala dinas dan badan, serta camat sebagai bawahan langsung yang mengelola kecamatan. Sistem tersebut terlihat

sebagai suatu organisasi bertingkat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan pembangunan dan pengoperasian berbagai potensi yang ada di daerah. Ada dua hal utama yang menjadi fokus dan sistem manajemen daerah yaitu. : a) organisasi dan b) komunikasi.

2. Pengawasan Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber daya Daerah

Aktivitas organisasi pemerintah harus dapat menjamin terhadap kelancaran komunikasi seluruh eksekutif dan perangkat organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah (komunikasi internal). Sedangkan komunikasi eksternal sangat diperlukan, sebagai unsur pengawasan dan kontrol dari masyarakat daerah serta dari perangkat perwakilan di DPRD. Semuanya pihak yang terkait harus diikutsertakan atau dilibatkan, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah juga diberi kekuasaan dan kewenangan luas, untuk dapat mengatur dan menentukan tingkat kebutuhan organisasi pemerintahan daerah, seperti yang tercantum dalam PP No.8/2003 dengan batasan-batasan umum. Keberadaan perangkat daerah yaitu organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dibentuk dengan kriteria seperti :

1. Kewenangan pemerintahan
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Ketersediaan Sumber daya aparatur pemerintahan daerah

5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga Keberadaan Perpustakaan Daerah/Umum, kemudian menjadi salah satu lembaga daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas di bidang perpustakaan yang karena sifatnya tidak tercakup dalam sekretariat daerah dan dinas. Terutama perpustakaan sebagai perangkat yang melaksanakan tugas utama pelayanan umum, sipil dan publik. Lembaga daerah termasuk salah satunya perpustakaan daerah, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila sekretariat daerah, dinas, badan dan perangkat daerah lain lebih berperan dalam fungsi layanan pemerintahan, maka perpustakaan daerah dapat mengambil peran dalam fungsi (penyebarluasan) informasi pemerintahan sebagai wujud nyata transparansi pemerintahan. Kondisi ini menjadi sangat strategis dan implementatif dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang berbasis dan berlandaskan *e-government*, yang memiliki esensi dalam pengiriman dan penyebaran informasi serta layanan publik. Fungsi pengawasan dan control dari masyarakat untuk berbagai proses pemerintahan dan pembangunan, dapat lebih dioptimalkan lagi dengan keberadaan informasi pemerintahan yang tepat sebagai pembanding.

3. Perpustakaan Daerah Sebagai Suatu Unit Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah Bervisi misi E-Government

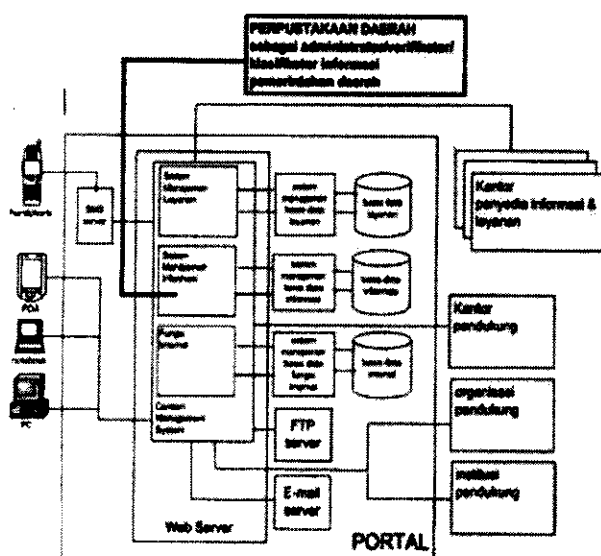
Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dan didukung oleh perkembangan ICT, menyebabkan produksi informasi

menjadi berkembang sangat pesat pula. Informasi yang telah dihasilkan oleh proses pembangunan dan pemerintahan di daerah sebagian besar berupa data. Berbagai data yang ada dalam pemerintah antara lain; data Statistik daerah, data kepegawaian daerah, data pendidikan, data proyek-proyek pembangunan, informasi bidang lingkungan, bidang penataan ruang, kepariwisataan dan sebagainya. Membiarkan informasi, data dan berbagai laporan yang berada di berbagai instansi pemerintah, membuat masyarakat akan lebih sulit untuk menemukan dan mendapatkannya, apalagi untuk berbagai laporan yang sifatnya lintas sektoral.

Mengumpulkan dan menghimpun data-data serta dalam suatu unit layanan informasi sangat penting bagi pembangunan daerah. Oleh karenanya sangat urgen membentuk suatu unit informasi dan komunikasi. Pilihan terbaik adalah memilih dan menentukan perpustakaan sebagai unit informasi dan komunikasi di pemerintahan daerah. Perpustakaan menjamin keberadaan informasi dari segi eksistensi, verifikasi dan klasifikasi, sehingga memudahkan pengguna menemukan informasi yang sangat dibutuhkannya. Wawan Wiroadmaja, (Journal Pustakawan Indonesia, Vol.6. No.1) berpendapat bahwa peran perpustakaan dan pustakawan adalah membantu pencarian informasi pemerintahan dan untuk mendapatkan informasi, dengan cara pencarian informasi dapat efisien dan efektif, tepat sasaran serta tepat waktu. Salah satu model penyebaran layanan jasa informasi dalam suatu *e-government* adalah disediakannya sebuah akses tunggal terstruktur berupa portal pemerintah, yang dapat diakses dengan

berbagai peralatan ICT, terutama menggunakan teknologi Internet.

Perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari administrator system informasi, yang memiliki peran untuk mengatur pengelolaan informasi pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan layanan jasa secara optimal pada masyarakat. Perpustakaan dapat memberikan kepada pengguna yang membutuhkan informasi yang up to date secara cepat, tepat dan bermanfaat. Adapun gambaran posisi perpustakaan daerah dalam implementasi *e-government*, di dalam sebuah arsitektur portal pemerintahan dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :



Dalam konsep masyarakat madani (*civil society*), ada empat pilar pemimpin masyarakat yang sangat berperan dalam pembangunan yaitu; (1). Pemerintah, (2). Kelompok Bisnis dan Industry, (3). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan (4). Media. Keempatnya tidak boleh lebih kuat satu dari yang lain. Pemerintah tidak boleh menjalin kerjasama dengan kelompok

bisnis dan industry tanpa memperhatikan masukan dari LSM dan media. Heterogenitas masyarakat menyebabkan diperlukan komunikasi yang lancar antara penentu kebijakan pembangunan daerah dan masyarakat lewat media massa.

Peran perpustakaan dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra, terutama bagi institusi di luar pemerintahan untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang seimbang. Sebagaimana fungsi tradisionalnya, pustakawan dapat mengarahkan pencari informasi pemerintahan untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang sah, cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pustakawan dapat pula menyediakan informasi yang mungkin sangat bernilai, namun keberadaannya sering tersembunyi, seperti literature kelabu (*grey literature*) dan sebagainya. Perpustakaan Daerah kemudian tidak hanya menjadi sumber bacaan umum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat informasi khusus pemerintahan daerah. Suatu pemerintahan yang bervisi *e-government* akan sangat menyadari bahwa eksistensi perpustakaan, merupakan sebuah elemen penting dalam proses transformasi informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

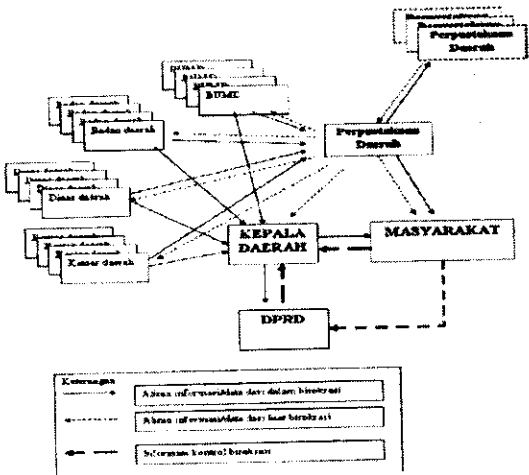
4. Transformasi Visi dan Misi Perpustakaan Daerah dalam Rangka Pengembangan *E-Government* Indonesia

Perkembangan ICT semakin pesat dan keragaman kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks, pada akhirnya sangat berimplikasi kepada perubahan paradigma perpustakaan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Kondisi tersebut sangat menuntut adanya

keberadaan SDM yang mumpuni, sebagai penyedia, pengelola informasi dan dokumentasi yang professional, berkompeten serta memahami secara maksimal terhadap pemanfaatan ICT. Dalam konsep *e-government*, jelas bahwa pemanfaatan ICT merupakan prasyarat utama untuk dapat terciptanya sebuah pemerintahan yang ideal.

Perpustakaan yang bervisi *e-government*, selalu mencoba dan berupaya untuk memberikan cara tercepat, termudah dan termurah dalam pemberian informasi kepada masyarakat, serta mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait, yang dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Informasi biasanya berasal dari internal pemerintahan dimanfaatkan sesama instansi, atau pun yang berasal dari luar institusi pemerintahan (media massa, Internet dan media lain), yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pendukung proses penetapan kebijakan pembangunan.

Gambar 3 : Fungsi perpustakaan daerah dalam pengelolaan informasi/data internal dan eksternal dari pemerintahan.



Kerjasama sinergis antara berbagai perpustakaan daerah yang bervisi sama, sangat dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar informasi dan data yang kemudian dapat dimanfaatkan bersama dan berfungsi dalam sebagai pembanding. Sebagai contoh, sebuah peraturan daerah yang terbukti berhasil diimplementasikan di suatu daerah, akan dapat diterapkan juga di daerah lain, apabila data-data pendukungnya tersedia secara lengkap. Kebijakan pembangunan tertentu yang telah ditetapkan dan dikeluarkan ternyata terbukti berhasil, maka dengan cepat dapat diimplemantasikan di daerah lain, dengan catatan apabila pertukaran informasi dan data yang diwakili oleh perpustakaan daerah berjalan dengan baik.

Demikian juga, kontrol terhadap berbagai proses pembangunan dapat dilakukan bila ada pembanding yang valid, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya proyek yang tidak mengena atau menyentuh masyarakat atau proyek dilakukan dengan cara yang korup. Kemajuan ICT dapat dengan cepat dapat mendukung pembangunan daerah, terutama memanfaatkan infomasi yang dapat ditransformasikan dan diformulasikan dalam bentuk digital.

Peran Pemerintah Pusat yang diwakili Perpustakaan Nasional, sangat diperlukan untuk melakukan adanya suatu koordinasi dan penyusunan kebijakan nasional, tentang pengembangan fungsi perpustakaan yang mendukung pengembangan *e-government* di Indonesia. Perpustakaan Nasional sangat berperan dalam menentukan dan membentuk standard klasifikasi informasi pemerintahan Indonesia Adapun klasifikasi yang akan ditentukan dan ditetapkan, dapat

berdasar jenis atau tipe sektor, contohnya: pariwisata, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, industry, dan transportasi. Bisa juga diorganisasikan berdasar tipe layanan, sebagai contoh masalah registrasi dan lisensi (surat ijin), atau pemesanan.

Selain itu, adanya berbagai perbedaan dalam mendeskripsikan suatu hal yang sama antar lembaga pemerintahan dan pengguna, harus juga diselesaikan. Adanya kesamaan pemahaman sangat urgen dan mutlak diperlukan dalam e-government, sebab memiliki kesamaan pemahaman atau kesamaan persepsi sangat penting, mengingat terdapat berbagai perbedaan dalam kewenangan lembaga pemerintahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sementara kebutuhan administrasi dan kebutuhan masyarakat, sangat sering menyebabkan suatu lembaga pemerintah sangat perlu untuk melakukan interaksi dan kerja sama dengan lebih dari satu lembaga pemerintahan yang berwenang.

Pencarian informasi juga harus menjadi perhatian tersendiri, dimana sangat diperlukan suatu sistem klasifikasi yang konsisten dari setiap informasi yang disediakan pada setiap badan atau lembaga pemerintah. Hasil dari sistem ini adalah sebuah catalog yang terintegrasi dan informasi yang tersedia, kemudian dapat disebarluaskan ke seluruh pemerintah daerah, untuk dapat dimanfaatkan oleh unit pengelola informasi perpustakaan daerah. Apabila membutuhkan informasi tentang "perijinan", maka perpustakaan dapat memberikan alternatif pilihan seperti perijinan perdagangan (usaha), perijinan bangunan (IMB) atau perijinan kendaraan (SIM atau STNK) dan sebagainya.

Bentuk ideal dari *e-government* adalah proses transformasi informasi, penyebaran dan penyalurannya, sepenuhnya sangat sarat dengan menggunakan ICT tanpa perlu memandang adanya keterbatasan pada ruang dan waktu (akses Internet). Namun demikian, bentuk antara seperti yang dapat dilakukan adalah dengan membuat titik-titik akses informasi pemerintahan di perpustakaan daerah, yang pada akhirnya akan menjadi sangat bermanfaat, untuk dapat menciptakan satu kesatuan informasi pemerintahan nasional yang ideal, manakala semua permasalahan akses dan infrastruktur telah teratasi dengan baik.

5. Kesiapan Dan Persiapan Pustakawan Dalam E-government

Pustakawan untuk dapat berperan aktif secara optimal, dalam berbagai aktivitas perpustakaan yang telah mengalami berbagai perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat memerlukan kesiapan-kesiapan yang memadai agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Apalagi setelah terjadinya reformasi, dimana terdapat perubahan –perubahan yang mendasar dan drastis pada konstelasi politik ditubuh pemerintahan dan negara. Dampak perubahan yang terjadi berskala luas dan menyeruak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam setiap terjadinya perubahan sosial, politik dan budaya tentu didalamnya terdapat peluang-peluang emas yang harus diperebutkan. Perpustakaan sebagai suatu badan dari pemerintah yang sehari-harinya berkecimpung menangani jasa layanan informasi, memiliki peluang besar

berkiprah dan berperan aktif dalam e-government. Kesempatan merebut dan memperoleh peluang dalam e-government, sangat luas dan terbuka bagi perpustakaan dan pustakawan. Namun demikian merebut kembali peluang emas itu tidaklah mudah sebagaimana membalikan tangan, melainkan melalui perjuangan berat dan melelahkan. Oleh karenanya perpustakaan dan pustakawan sangat membutuhkan kesiapan dan persiapan yang matang dan mumpuni dalam mendukung pelaksanaan e-government di tingkat pemerintahan daerah. Terutama pustakawan dituntut untuk sangat lihai, trampil dan mampu serta mumpuni untuk menangani berbagai permasalahan informasi dan implementasi pemanfaatan ICT di pemerintahan daerah. Secara otomatis peluang yang ada itu, masih dapat direbut dan dimenangkan oleh perpustakaan apabila para pustakawannya juga memiliki kesiapan-kesiapan yang maksimal, sehingga sangat mumpuni dalam *e-government*.

Kesiapan yang harus dimiliki pustakawan itu adalah kesiapan memiliki kompetensi, keahlian, ketrampilan, kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya dengan baik, sehingga citra perpustakaan semakin meningkat baik dan penguatan citra perpustakaan semakin kokoh tak tergoyahkan eksistensinya. Menurut pendapat Agung Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa:

"Kompetensi adalah standart bagi individu untuk menangani tugas khusus, yang merupakan kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ditujukan untuk memperbaiki

kinerja sehingga mampu menghasilkan pekerjaan menjadi lebih baik."

Harapan masyarakat menuntut kinerja pustakawan harus optimal, dalam memberikan layanan jasa informasi kepada pemakai. Oleh karenanya pustakawan harus memiliki kompetensi yang tinggi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lasa HS (2008), agar supaya pustakawan mampu berperan secara maksimal, maka diperlukan adanya lima kompetensi pada diri mereka yaitu:

1. Kompetensi personal, adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang berupa kemampuan pribadi yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan bersifat pribadi. Tujuan memiliki kompetensi ini supaya pustakawan memiliki kemampuan dalam minat intelektual, budaya, rekreasional, berbahasa asing, komunikasi lisan maupun tertulis, antusias pada perbukuan dan jiwa kepemimpinan.
2. Kompetensi manajemen, adalah kemampuan pustakawan dalam menguasai manajemen perpustakaan dengan baik
3. Kompetensi pendidikan, adalah kemampuan mendorong dan membimbing pemustaka untuk mandiri dalam akses informasi dan pemanfaatan bahan informasi dalam usaha meningkatkan diri.
4. Kemampuan pelayanan, adalah kemampuan memberikan dan menyediakan segala jenis pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan.
5. Kompetensi ilmu pengetahuan adalah kemampuan pustakawan untuk mengelola perpustakaan dengan basis

asing dengan baik terutama bahasa Inggris, (9) Kemampuan mengembangkan teknik dan prosedur kerja, (10) Penguasaan melakukan penelitian, (11) Kemampuan menulis buku dan jurnal, (12) Terbuka terhadap berbagai inovasi, (13) Kepekaan sosial, (14) Selalu siap menerima perubahan, (15) Percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, (16) Berorientasi kekinian dan masa depan, (17) Tanggap dan adaptif terhadap perubahan, (18) Tanggap untuk menangkap berbagai peluang yang ada, (19). Menghormati perbedaan dan menghargai orang lain, (20) ramah dan sopan santun, (21) Kemauan untuk selalu maju dan tidak fatalisme, (22) Tidak takut tantangan dan hambatan, (23) Berpenampilan rapi dan baik, (24) Bekerja efisien dan efektif, (25) Disiplin dalam bekerja, (26) Menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, (27) Produktivitas dan kualitas kerja sangat baik, (28) Kemampuan bekerja sama (29) Kreatif, (30) Inovatif, (31) Visioner, (32) Cakap berperan sebagai Publik Relation (PR) perpustakaan (33) Piawai dalam melakukan lobi politik, (34) Ahli berinteraksi dengan pihak-pihak penentu kebijakan publik.

Adanya kesiapan dan persiapan matang dan perjuangan panjang tak kenal lelah, maka upaya merebut kembali peluang emas perpustakaan sebagai *e-government* akan dapat diwujudkan. Artinya keinginan ini bukanlah utopia belaka sebagaimana yang dipikirkan banyak orang. Pustakawan di masa kini dan di masa mendatang akan terus berkembang baik tingkat kompetensi, profesionalitas, hard skill, soft skill dan spiritual skill, sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dan mumpuni dalam mewujudkan perpustakaan daerah sebagai *e-*

government dan pustakawan dapat berperan aktif sebagai motor penggerak utama dalam mendukung *e-government* di pemerintahan daerah.

SIMPULAN

1. Dampak dari penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah pasca reformasi adalah perpustakaan Daerah merupakan titik akses informasi dan komunikasi pemerintahan, selain menjalankan tugas umumnya sebagai sumber bacaan bagi masyarakat, sangat dapat mendukung terwujudnya *e-government*.
2. Transformasi visi dan misi perpustakaan daerah adalah sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan bervisi *e-government*, sehingga dapat diharapkan semakin cepat tercipta suatu pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Eksistensi perpustakaan daerah akan dapat menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam pengembangan dan perkembangan implementasi *e-government* di daerah, sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kesiapan dan persiapan pustakawan sangat dibutuhkan sekali untuk berperan sebagai aktor penting dalam *e-government*, oleh karenanya sangat perlu untuk membekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, sehingga dapat memiliki derajat kepantasan dan

sangat mumpuni dalam e-government.

5. Peluang dalam e-government masih terbuka lebar dan sangat mungkin dapat direbut dan direngkuh kembali, apabila para pustakawan memiliki kesiapan dan persiapan yang matang dan sangat mumpuni dalam e-government, terutama kesiapan dalam penguasaan ICT.

SARAN

1. Pustakawan seyogjanya secara rutin dan intesip, untuk selalu melakukan komunikasi dan kerja sama yang baik dan sinergis dengan para pejabat daerah, guna mempromosikan peran perpustakaan dalam membantu pembangunan dan perkembangan daerah berbasis e-government.
2. Perlu kesiapan yang matang bagi pustakawan dalam konsep, perencanaan, implementasi dan pengembangan e-government, sehingga menjadi keharusan bagi pembangunan daerah yang berdasarkan otonomi daerah dan bervisi maju dengan e-government.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan Syamsyuddin, Nazaruddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press.
- Center for Democracy and Technology (CDT). E-Government Handbook.

<http://www.cdt.org/egov/handbook/> 3Maret 2005.

Handayaniingrat S. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

Lasa HS. 2008. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gramedia.

Nugroho, Agung. 2013. *Menakar Peranan Dalam Implementasi Teknologi Informasi Di Perpustakaan*. Jurnal Khazanah Al-Hikmah Vol.1 no.2. Juli-Desember.

Osborne D., Gaebler T. 1996. *Mewirusaha Birokrasi*. Rosyid A., penerjemah. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari : *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming th Public Sector*.

Pendit, Putu Laxman. 2008. "Kompetensi Informasi dan Kompetensi Pustakawan" makalah Lokakarya Pustakawan Swasta se Jabodetabek. Jakarta 14-15 Januari.

Purwono. 2013. *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Siagian SP. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://www.excelgov.org>. 1 maret 2003.

Special Library Association, 1996. *Competencies for Special Librarians of the 21 Century Submitted to the Board of Directors by the Special Committee on Competencies for Special Librarians* Diakses pada tanggal 21 oktober 2015 dan Tersedia di <http://www.sla.or~professiona/competency.html#top>

United Nations Division for Public Economics and Public Economic and Public Administration (UN-DPEPA). 2002. *Benchmarking E-Government: A Global Perspective*. New York: America Society for Public Administration.

Sugandha D.1989. *Pengantar Admimstrasi Negara*. Jakarta: Intermedia.

Webster, Frank. 2006. *Theories of the information society*. Third edition. New York: Routledge.

Suradinata E. 1994. *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan*. Bandung: Ramadan.

Wimmer M, Krenner J. 2001. *An Integrated Online One-Syop Government Platform: The e Government Project*. In Hofer, Chroust. IDIMT2001. 9th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings, Schriftenreihe Informatik, Universitksverlag Trauner, Linz, p.329-337.

Tambouris E., Gorilas S., Boukis G. 2001. *Investigation of Electronic Government Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics*; Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001. Hlm 367-376.

Wiraatmaja, Wawan, Kudang Boro Seminar. *Memposisikan Perpustakaan Daerah dalam Pengembangan E-Government di Indonesia*. Jurnal Pustakawan Indonesia Vol. 6 No. 1 (disadur dari artikel tsb).

The Council for Exelence in Governme (CEG). 2000. *E-Government The Next American Revolution. Intergovernmental Technology Consotium*.

World Bank. 2001. *A Definition of E-Government*. <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>. 3 Maret 2005.